

TAJUK RENCANA

Netralitas Pejabat Membingungkan

UNGKAPAN di atas wajar bergulir ketika Menkopolkham Budi Gunawan mengatakan bahwa semua pejabat negara, termasuk menteri-menteri harus netral dalam Pilkada 2024. Sementara ungkapan berbeda disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi yang menyebutkan aturan netralitas hanya berlaku bagi para aparat sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Sedang presiden dan menteri-menteri, terutama yang berasal dari partai politik, boleh mengendorse calon, bahkan boleh berkampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan hari kerja, kecuali cuti (KR 11/11). Jika demikian, lantas pernyataan mana yang benar? Masyarakat agaknya dibuat bingung dengan pernyataan di atas yang bertolak belakang.

Seperti kita tahu, presiden berasal dari atau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Begitu pula Presiden Prabowo Subianto, berasal dari Partai Gerindra, bahkan ia ketua umumnya. Prabowo memang harus memisahkan kapasitasnya sebagai presiden untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sebagai ketua umum partai. Dua peran tersebut sangat berbeda secara diametral, namun dalam praktiknya acap sulit dipisahkan. Kapan Prabowo bertindak sebagai presiden atau kepala pemerintahan dan kapan sebagai ketua umum partai.

Dalam konteks pilkada, Prabowo sebagai presiden yang sekaligus kepala negara tentu harus netral, tak boleh berpihak kepada kandidat atau calon yang maju pilkada. Namun, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ia berhak mengendorse calon atau bahkan berkampanye untuk partainya. Artinya, Prabowo tidak kehilangan hak politiknya untuk mendukung calon yang berasal dari partainya. Kuncinya terletak pada sejauh mana hak tersebut digunakan, apakah

melampaui batas-batas kewenangannya atau tidak.

Karena itu, harus ada aturan yang tegas dan rigid, kapan pejabat negara, baik presiden maupun menteri, boleh berkampanye untuk calon dari partainya. Batasan bahwa presiden maupun menteri saat berkampanye tak boleh menggunakan fasilitas negara, sudah tepat. Mereka juga tak boleh berkampanye pada hari kerja, kecuali mengambil cuti.

Hanya saja, implementasi aturan tersebut tidak mudah. Sebab, acap keduanya tak bisa dibedakan, yakni Prabowo sebagai presiden atau kepala pemerintahan dan sebagai ketua umum partai. Hal sama juga terjadi pada para menteri, terutama yang berasal dari kader parpol. Konkretnya, tak gampang untuk memisahkan antara kepentingan parpol dan kepentingan rakyat, serta mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan parpol.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan netralitas ASN, TNI dan Polri. Bisakah mereka benar-benar netral ketika atasannya (baik menteri maupun presiden) berkampanye untuk calon tertentu yang berasal dari partainya? Tentu akan ada hambatan psikologis karena ada relasi kuasa atasan-bawahan, sehingga netralitas menjadi terabaikan.

Dalam kaitan itulah kita mengingatkan Bawaslu selaku pengawas pemilu/pilkada berperan aktif menjaga agar pesta demokrasi lokal ini berjalan demokratis, jujur dan transparan. Artinya, jika terjadi pelanggaran, termasuk soal netralitas pejabat negara, termasuk ASN, TNI, Polri harus ditindaklanjuti. Pelanggaran tak boleh dibiarkan karena akan berdampak pada kualitas pilkada itu sendiri. Masyarakat juga berhak mengawasi dan menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi telah ditegakkan dalam hajatan Pilkada serentak 2024. □ - d

CATATAN HARI DIABETES SEDUNIA

'Mendobrak Hambatan, Menjembatani Kesenjangan'

Ambar Rukmini

dan stigma terhadap penderita diabetes, khususnya tipe 2, juga menjadi hambatan tambahan yang menghalangi mereka mendapatkan perawatan optimal.

Hambatan utama penanganan diabetes adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang pencegahan dan deteksi dini, serta akses terhadap alat diagnosis

gram perawatan diabetes berbasis masyarakat; pasien didorong untuk bergabung dalam kelompok-kelompok pendukung yang dapat memberikan informasi dan dukungan secara emosional dan praktis. Pendekatan berbasis teknologi, seperti telemedicine, juga semakin dikembangkan dan dapat menjadi solusi untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi penderita diabetes yang berada di daerah terpencil.

Peran masyarakat dan individu sangat penting untuk menekan angka diabetes. Edukasi tentang pola makan sehat, aktivitas fisik yang teratur, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala merupakan hal yang perlu ditingkatkan. Selain itu, meningkatkan solidaritas terhadap penderita diabetes dapat membantu mengurangi stigma yang mereka hadapi dan mendorong mereka untuk lebih terbuka guna memperoleh dukungan.

Hari Diabetes Sedunia menjadi pengingat bagi kita semua bahwa diabetes bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga tantangan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian dan tindakan kolektif. Dengan tema "Mendobrak Hambatan, Menjembatani Kesenjangan", kita diingatkan untuk terus berupaya mengurangi kesenjangan dalam penanganan diabetes dan memastikan setiap orang, di mana pun mereka berada, memiliki akses terhadap perawatan yang mereka butuhkan. Mari kita bersamasama mendukung penderita diabetes dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih sehat dan inklusif. (*)-d

***Prof Dr Ir Ambar Rukmini MP,**
Dosen Program Studi Teknologi Pangan Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

HARI Diabetes Sedunia diperingati setiap tanggal 14 November. Diinisiasi oleh International Diabetes Federation (IDF) dan didukung WHO, peringatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang diabetes, penyakit kronis yang menjadi ancaman kesehatan serius. Dengan tema "Mendobrak Hambatan, Menjembatani Kesenjangan", peringatan tahun ini menekankan pentingnya akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita diabetes di seluruh dunia.

Diabetes adalah kondisi kronis yang terjadi saat tubuh tidak mampu mengatur kadar gula darah secara efektif. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1, yang biasanya muncul sejak masa kanak-kanak atau remaja karena faktor autoimun; dan diabetes tipe 2, yang sering kali terkait dengan gaya hidup dan umumnya terjadi pada orang dewasa. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kerusakan saraf, dan gangguan penglihatan.

Dengan meningkatnya kasus diabetes, terutama tipe 2, penyediaan layanan kesehatan yang memadai kian diperlukan untuk memastikan pasien dapat mengelola kondisi mereka secara efektif. Di Indonesia, jumlah penderita diabetes tergolong tinggi, dengan banyak kasus yang tidak terdiagnosis. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat, terutama akibat gaya hidup yang kurang sehat, kebiasaan makan yang buruk, dan minimnya aktivitas fisik.

Menurut IDF, pada tahun 2021 lebih dari 537 juta orang hidup dengan diabetes. Angka ini diproyeksikan terus meningkat. Namun, akses untuk mendapatkan perawatan yang memadai dan berkelanjutan menjadi tantangan besar. Banyak negara, terutama negara berkembang, mengalami kesulitan menyediakan layanan kesehatan bagi penderita diabetes karena keterbatasan sumber daya, tenaga medis, serta infrastruktur.

Kesenjangan tersebut semakin nyata ketika pandemi COVID-19 melanda, yang memperlihatkan bagaimana sistem kesehatan di banyak negara masih belum sepenuhnya siap menangani lonjakan pasien dengan penyakit kronis, termasuk diabetes. Selain itu, diskriminasi



dan pengobatan. Di banyak daerah terpencil, akses ke insulin dan obat-obatan masih terbatas; menyebabkan banyak penderita diabetes tidak mendapatkan pengobatan memadai.

Untuk mendobrak hambatan tersebut, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat luas. Program-program edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, kampanye kesehatan di media, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau merupakan langkah konkret yang bisa diambil untuk meningkatkan kesadaran serta akses masyarakat terhadap perawatan diabetes.

Menjembatani kesenjangan penanganan diabetes membutuhkan strategi komprehensif dan inklusif. Ini mencakup upaya memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah, serta memberikan subsidi atau bantuan finansial bagi penderita diabetes yang kurang mampu. Beberapa negara telah memulai pro-

Trans Jogja sebagai Jenama Kota

Priyatno B Hernowo

YOGYA berasosiasi dengan Tugu, Kraton, Malioboro, Batik, Gudeg, Bakpia Pathok, Angkringan, maupun ingatan gempa Yogya atau letusan Gunung Merapi. Nama kota dengan berbagai atribut atau ingatan yang melekat tentangnya, itulah *city branding* atau Jenama Kota.

City branding adalah strategi kota untuk menancapkan citranya, *positioningnya*. Mampu mengundang kunjungan ke kota yang *mem-branding*. Yogya diletakkan sebagai kota budaya, pariwisata, dan pendidikan.

Transportasi Publik sebagai Jenama Kota.

Beberapa transportasi publik identik dengan kotanya, sebagai contoh *Cable Car* di San Francisco, *The Tube* di London, *Vaporetto* di Venesia, *Tram* di Melbourne dan *TransJakarta* di Jakarta.

Faktor kesejarahan, keunikan dan ke-dayagunaan adalah piciuan transportasi publik sebagai bagian jenama kota. *Cable Car*, trem beroperasi lebih dari 150 tahun. Sejarah panjang menjadi pemikat *Cable Car*. *The Tube* dengan logo bundar merahnya adalah elemen lekat London. Jaringan 402 km dengan penumpang rerata 3 juta/hari adalah pilihan utama mobilitas. *Vaporetto*, bus air di Venice dengan 19 jalur menjadi tujuan turis. Trem Melbourne, dengan 1.700 pemberhentian di 24 rute, menjadi pilihan transportasi publik. *TransJakarta*, Bus Rapid Transit (BRT) dengan jalur busway menjadi simbol transformasi transportasi kota. *TransJakarta* menjadi bagian kehidupan warga Jakarta.

Transportasi publik di atas tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas, juga menjadi identitas dan jenama kota yang dikenal. Bagaimana *Trans Jogja*?

'Brand Equity' Trans Jogja
Berawal dari kebutuhan BRT di Jogja, digagas *Trans Jogja* sebagai pemenuhan urusan wajib pemerintah dalam penyediaan transportasi publik. *Trans Jogja* dengan 6 trayek dan 54 bus mulai operasi tanggal 17 Februari 2008.

Sejak tahun 2015, PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI), BUMD DIY, di-

tugaskan sebagai pengelola *Trans Jogja*. Saat ini, PT AMI bekerjasama dengan PT Jogja Tugu Trans (PT JTT) sebagai mitra operator. Armada operasi 95 bus untuk melayani 19 jalur. *Load factor* dari *Trans Jogja* secara rerata masih di bawah 15%. Nilai dan reputasi dari *Trans Jogja* di mata pasar -dengan ukuran *proxy load factor*- masih kecil. Perlu peningkatan *brand equity* *Trans Jogja*.

Peningkatan *brand equity* meliputi perbaikan *Brand Awareness*, *Brand Perception*, *Brand Loyalty* dan *Brand Quality*. *Brand Awareness* adalah gambaran konsumen mengenali dan mengingat suatu *brand*. Apakah *Trans Jogja* menjadi *top of mind*? *Brand Perception* merupakan bentuk pengalaman pelanggan, baik melalui kontak langsung atau melalui informasi yang dicerna tentang *brand*. *Brand Loyalty* memperhatikan keterikatan dengan *Trans Jogja*, pelanggan menjadi *influencer* atas keberadaan *Trans Jogja*. *Brand Quality* menjadi faktor kuat dalam *brand equity*. Ukurannya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada pemangku kepentingannya.

Strategi 'Push' dan 'Pull'
Pungkit *Brand Equity* *Trans Jogja* adalah strategi *Push* dan *Pull*. Pendekatan kombinasi penerapan insentif untuk penggunaan transportasi publik (*pull strategy*) dan disinsentif untuk penggunaan kendaraan bermotor pribadi (*push strategy*). *Pull strategy* yang sudah dijalankan adalah memberikan alokasi subsidi dalam penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *ibuy the service* *Trans Jogja*. *Push strategy* yang sudah diterapkan di Yogya: penerapan pembatasan

kendaraan bermotor di Malioboro pada pukul 18 ñ 21 WIB.

Ekosistem *Trans Jogja* berbenah sebagai bagian dari *pull strategy*. Bus nyaman, kru yang melayani dan tertib, rute mencakup kebutuhan warga, halte manusiawi, tarif terjangkau, kesetaraan serta aplikasi yang mendukung menjadi agenda ungu.

Push strategy perlu ditambahkan dengan perluasan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dalam hal waktu dan lokasi, pemberlakuan kawasan bebas parkir, tarif parkir yang progresif serta penerapan hari *Trans Jogja* untuk ASN DIY dan pegawai BUMD akan menjadi pendorong penggunaan *Trans Jogja*.

Penutup
Trans Jogja menjadi *top of mind* warga Yogya dan wisatawan sebagai pemenuh kebutuhan mobilitas, membentuk *Trans Jogja* menjadi salah satu jenama Yogya. Perlu strategi, taktik yang melibatkan pemangku kepentingan. Tidak gampang, tapi bukan tidak mungkin. (*)

***Priyatno B Hernowo,** Direktur Utama PT Anindya Mitra Internasional, Pengelola *Trans Jogja*.

Pojok KR

BPOM cabut izin edar 16 produk kosmetik.
- Tindak juga oknum yang terlibat.

Menang praperadilan, status tersangka Paman Birin gugur.
- Semua pihak hormati putusan pengadilan.

Kampung Panca Tertib dilibatkan awasi peredaran miras.
- Bukan sekadar slogan.

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yurika Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkr23@yahoo.com, iklanlkr13@gmail.com. Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/ baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. .
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.